

Norma-Norma, Identitas, dan Politik Luar Negeri A.S. Periode ke-2 Bush

Suzie S. Sudarman

The relationship of political identities to human interest is complex but it is credible to think that political identities can play such decisive roles. A good example of this is the preception of threats, which is often a function of what others intend to do with their power. In turn these intentions may arise from domestic factors and more deeply seated strategies and cultures. Hence the effects of the relative difference between internal national identities on the way states behave toward one another in the external environment. In this essay I focus on the fact that in a globalized era and the post September 11th strategy the Bush administration continues to deem important the assertion of American values in order to find security.

I have never come upon objective results, and I never will; the post-modernists and poststructuralists are right: such results do not and cannot exist. And they are also right in arguing that the prevailing consensus may overlook matters of concern, silences in which attention needs to be paid. But they are wrong, I would argue, in claiming that those committed to scientific inquiry presume they can uncover objective truths. Our early enthusiasm for behavioralism may have conveyed such a presumption, but it was not long before our subsequent "truth" claims were couched in probabilistic terms that acknowledged the intersubjective nature of any conclusions derived from systematic analyses. To repeat, be they in the hard or soft sciences, the best that scientists can do is uncover findings that are the focus of widespread consensus. James Rosenau, *Distant*

Proximities, 2003

Pengantar

Amerika Serikat melalui pembangunan jaringan aliansi dan komitmen multilateral berhasil membangun sistem Amerika atau sebuah hegemoni yang terbuka dan terlembaga.¹ Sekalipun demikian negara-negara di dunia tetap saja mengevaluasi diri dari sudut perbedaan identitas maupun kekuatan mereka masing-masing.² Citra domestik, nilai-nilai yang dianut dan identitas atau budaya serta identitas khususnya menjadi faktor penentu dalam politik luar negeri dan kebijakan nasional sebagaimana juga yang berlaku di Amerika Serikat.³ Menurut Katzenstein memang perbedaan antara madzhab realisme dan liberalisme kini telah semakin mengecil. Pemanfaatan

¹ G. John Ikenberry, "American Grand Strategy in the Age of Terror," dalam *Survival* 43, no. 4 (Winter 2001-02): 19-34.
² Henry R. Nau, *At Home Abroad, Identity and Power in American Foreign Policy*, Ithaca: Cornell University Press, 2002.
³ *Ibid.*, dan Peter J. Katzenstein, "Conclusion: National Security in a Changing World," dalam Peter J. Katzenstein (ed.), *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, New York: Columbia University Press, 1996.

model ekonomi dalam politik dan perspektif pilihan teoritis (*choice theoretic*) telah berpengaruh terhadap versi sentris teori-teori realis dan liberal. Keadaan ini meningkat secara drastis setelah terjadinya perubahan internasional dan diintegrasikannya soal kultur dan identitas di dalam analisis soal keamanan nasional.⁴

Dalam pengkajian soal norma-norma, identitas dan politik luar negeri Amerika Serikat periode Bush kedua, hal pokok yang perlu disikapi adalah pengupayaan terciptanya tatanan dunia yang baru hingga masa setelah terjadinya tragedi 11 September 2001. Akan diargumentasikan dalam telaah ini bahwa konteks institusional kultural dan identitas merupakan penyebab munculnya tujuan (*purposes*) penggunaan kekuatan Amerika Serikat. Dalam paparan ini akan diupayakan untuk menjawab tentang apa dan bagaimana sebenarnya proses membangun tujuan pemerintahan Amerika Serikat tersebut tentunya dengan mempertimbangkan pula kenyataan bahwa serangan 11 September itu sangat mengejutkan dan menyebabkan timbulnya rasa ketakutan dan kerisauan dalam jangka pendek dan panjang di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Pembahasan ini sekaligus juga menjawab tentang apakah memang ada cara lain untuk mengkonseptualisasikan hubungan internasional dan soal-soal kebijakan pemerintahan Amerika Serikat.⁵

Pendekatan Amerika Serikat dalam Hubungan Luar Negerinya

Untuk memahami hubungan luar negeri Amerika Serikat perlu cara pendekatan tertentu. Robert Osgood⁶ menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara idealisme universal dan kepentingan nasional dalam hubungan luar negeri Amerika Serikat. Kepentingan nasional yang paling utama adalah daya tahan, kepentingan vital, kemandirian, gengsi nasional, penganggungan nasional. Sedangkan idealisme meliputi harga diri, prinsip bertindak yang baik, kesetiaan kepada keadaan internasional yang menguntungkan semua orang seperti perdamaian, hasrat yang baik dan keadilan antar bangsa. Tugas negarawan adalah mengupayakan terjalannya kepentingan nasional dan idealisme supranasional.

Stanley Hoffman⁷ nampaknya lebih menyoroti soal *set-up* kelembagaan atau sumber-sumber dan pengaruh pemerintah. Ia berasumsi bahwa ada hubungan antara substansi kebijakan dengan proses pembuatannya. Sifat jabatan atau kedudukan dalam menentukan kebijakan juga berpengaruh pada orang yang menjabatnya. Hoffman menjelaskan pula keterkaitan antara masa lalu, prinsip Amerika tentang penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dan perubahan secara damai (*peaceful change*) serta sifat bangsa Amerika yang pragmatis dalam menciptakan kesan yang bisa disebut sebagai gaya nasional Amerika Serikat.

Michael Mandelbaum⁸ memaparkan pola tindak internasional Amerika Serikat yang menunjukkan ciri negara kuat. Negara kuat lazim berekspansi. Promosi demokrasi atau sikap "dari dalam ke luar" (*inside-out*) lah yang akan menjelaskan mengapa Amerika Serikat berekspansi untuk menyebar luaskan ciri-

⁴ Peter J. Katzenstein, "Conclusion: National Security in a Changing World," dalam Peter J. Katzenstein (ed.), *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*

⁵ Rogers M. Smith, "The Politics of Identities and the Tasks of Political Science," dalam Ian Shapiro et al. (eds.), *Problems and Methods in the Study of Politics*, Cambridge University Press, 2004.

⁶ Robert E. Osgood, *Ideals and Self Interest in America's Foreign Relations. The Great Transformation of the Twentieth Century*, third impression, Chicago: The University of Chicago Press, 1961.

⁷ Stanley Hoffman, *Gulliver's Troubles, or, the Setting of American Foreign Policy*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1968.

⁸ Michael Mandelbaum, *The Fate of Nations. The Search for National Security in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

ciri negerinya ke seluruh sistem internasional. Negara kuat juga tertarik ke luar oleh keresahan yang terjadi di tempat lain. Mereka biasanya berupaya melindungi dirinya. Hal ini juga yang dikenal dengan istilah "dari luar ke dalam" (*outside-in*).

Bagi kalangan yang mengutamakan soal kultur dan identitas bangsa Amerika berlaku pandangan berikut ini. Tatanan sosial di Amerika Serikat merefleksikan betapa signifikannya hubungan antara taraf hidup bangsa dengan pembentukan identitas kewarganegaraan yang berlangsung melalui sebuah proses wacana yang panjang. Menurut John M. Owen IV identitas berkenaan dengan kelompok sosial di mana seseorang dapat menjadi anggota. Identitas seseorang dengan sendirinya menyangkut keanggotaan kelompok yang saling mencakup (*overlap*). Seseorang dapat menjadi anggota kelompok yang berbeda sebagai misal alumni sebuah universitas, dan penduduk sebuah daerah tertentu, sehingga ia akan memiliki identitas diri yang khas.⁹ Dapat pula dibayangkan bahwa keanggotaan ini sekaligus merefleksikan serta mendefinisikan keamanan fisik dan kekuasaan politik.¹⁰

Citra dirinya juga bisa mengalami perubahan apakah lebih terpengaruh hal-hal yang bersifat ideologis yang diasosiasikan dengan konstitusi Amerika dan keyakinan (*creed*) atau hal-hal yang berkenaan dengan kebangsaan atau asal usulnya (*nativistic*) seperti sejarahnya, bahasanya, kelasnya, atau yang berkenaan dengan agamanya seperti kenyataan bahwa bangsa Amerika itu adalah bangsa *Puritan* dan *Judeo-Christian*, atau suku bangsanya yang berkenaan dengan ras dan sifat multikulturalnya. Dalam bukunya yang terakhir yang sarat kontroversi Samuel P. Huntington mengungkapkan bahwa "Mimpi Amerika" (*the American Dream*) adalah mimpi yang diciptakan oleh masyarakat Anglo-Protestan. Dan selama yang bukan Anglo-Saxon berkulit putih dan beragama Protestan tetap menganut kebudayaan Anglo-Protestan dan nilai-nilai politiknya ini, maka Amerika pun akan lestari.¹¹ Dalam tulisan sebelumnya pun ia telah beranggapan bahwa *American creed* itu meliputi nilai-nilai liberal, demokratik, individualistik, dan egalitarian.¹²

Untuk memahami Amerika Serikat ada tiga faktor yang sangat menentukan¹³ antara lain yang pertama, pengalaman kolonialnya yang cenderung menonjolkan segi *self-government* (pemerintahan sendiri). Yang kedua adalah jaraknya, Amerika Serikat dipisahkan oleh alam dan laut dari kawasan lainnya di dunia. Yang ketiga, besarnya pengaruh "American liberal creed" di mana sistem politiknya senantiasa berupaya untuk menghindarkan posisi ekstrim kiri dan kanan. Ketiga hal di atas membangun identitas bangsa Amerika, namun demikian dalam kenyataannya senantiasa pula terjadi pergeseran antara makna dan praktek yang terkait dengan identitas itu. Pemahaman dialektis tentang budaya membuka kemungkinan kegiatan pembuatan makna itu sebagai suatu hal yang stabil atau yang mudah berubah, ia bisa berupa sebuah sistem yang tunggal maupun bervariasi dan berkonflik, sebuah

⁹ John M. Owen IV, "Transnational Liberalism and American Primacy; or Benignity Is in the Eye of the Beholder," dalam G. John Ikenberry (ed.), *America Unrivaled, The Future of the Balance of Power*, Ithaca: Cornell University Press, 2002, 243.

¹⁰ Rogers M. Smith, "The Politics of Identities and the Tasks of Political Science," 51.

¹¹ Samuel P. Huntington, *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*, New York: Simon Schuster 2004; Alan Wolfe, "Review Essay: Native Son. Samuel P. Huntington Defends the Homeland," dalam *Foreign Affairs* 83, no. 3 (May/June 2004): 120-125; Response: "Credal Passions: Immigration and American Identity," Samuel P. Huntington, "Getting Me Wrong," dan Alan Wolfe, "Wolfe Replies," dan Samuel P. Huntington, "Replies," dalam *Foreign Affairs* 83, no. 5 (September/October 2004): 155-158; 158-159; 159.

¹² Samuel P. Huntington, "American Ideals versus American Institutions," dalam G. John Ikenberry, *American Foreign Policy: Theoretical Essays*, third edition, New York: Longman, 1999: 221.

¹³ Henry R. Nau, *At Home Abroad, Identity and Power in American Foreign Policy*.

aspek dari struktur maupun *agency*, bisa menjadi *variable independen* dan *dependen* bergantung kepada pertanyaan dan strategi yang digunakan.¹⁴

Demokrasi liberal sebagai misal memang membangun konstruksi identitas yang sakral ("*sacred*" *identity construction*) akan tetapi kalangan lainnya pun diharapkan bisa merubah diri agar kemudian menjadi sebuah demokrasi liberal pula.¹⁵ Komunitas keamanan liberal sekalipun lebih disiplin dalam menarik garis perbatasan tetap membuka diri terhadap negara-negara lainnya yang akan menjadi anggota ketika mereka telah berubah menjadi demokratis pula. Ancaman keamanan dengan demikian dianggap berasal dari tatanan dalam negeri sebuah negara bukan dari kapabilitas materinya.¹⁶ Identitas liberal juga diimbangi oleh rasa loyalitas yang lemah terhadap komunitasnya karena itulah kecenderungan individualisme akan senantiasa membatasi kapasitas pemimpin politik dalam penyelenggaraan perang.¹⁷ Citra nasional (*national image*) Amerika Serikat sebagaimana tersebut di atas pada akhirnya bermuara kepada kebijakan nasional terhadap bangsa-bangsa lainnya di dunia karena ia menjadi prisma, atau lensa yang menapis (*filter*) pandangan para pengambil kebijakan.¹⁸

Organisasi jajak pendapat jelas menunjukkan bahwa bangsa Amerika memiliki kadar kebanggaan terhadap bangsanya yang cukup tinggi.¹⁹ Orang-orang Amerika bukan saja merasa bangga terhadap nilai-nilainya namun juga menganggapnya sebagai hal yang bisa diberlakukan secara universal. Jika di tahun 1941 Henry

Kadar Kebanggaan (<i>national pride</i>)		
Presentase orang dalam negara yang menyatakan rasa kebanggaan yang sangat tinggi terhadap bangsanya.		
Country	1990	1999-2000
Britain	53	49
Denmark	42	48
Egypt	N/A	81*
France	35	40
India	75	71
Iran	N/A	92*
Ireland	77	74
Italy	40	39
Mexico	56	80
Netherlands	23	20
Philippines	N/A	85*
Poland	69	71
United States	75	72
Vietnam	N/A	78*

*2001 survey data Source: World Values Survey

¹⁴ Lisa Wedeen, "Conceptualizing Culture: Possibilities for Political Science," dalam *APSR* 96, no. 4 (December 2002): 713-728.
¹⁵ Thomas Risse, "U.S. Power in a Liberal Security Community," dalam G. John Ikenberry (ed.), *America Unrivaled. The Future of the Balance of Power*, Ithaca: Cornell University Press, 2002.
¹⁶ Ibid.
¹⁷ Ibid. 271.
¹⁸ Susan M. Matrese, *American Foreign Policy and the Utopian Imagination*, Amherst: University of Massachusetts Press, 2001.
¹⁹ Minxin Pei, "The Paradoxes of American Nationalism," dalam *Foreign Policy* 136 (May-June 2003):32.

Luce sekedar menganjurkan bahwa kemakmuran A.S. yang mulai tumbuh di tahun 1920an harus pula dinikmati oleh seluruh umat manusia yang telah sadar akan visi Amerika, lain lagi dengan anggapan yang terungkap di masa kini.²⁰ Menurut survey Sikap Global PEW (*PEW Global Attitudes*), 79 persen orang Amerika yang di poll setuju akan kenyataan bahwa gagasan-gagasan Amerika dan kebiasaan mereka itu perlu disebarluaskan di seluruh dunia; sedangkan 70 persen menyatakan bahwa mereka menyukai gagasan Amerika tentang demokrasi.²¹

Sekalipun kata nasionalisme itu di Amerika Serikat kurang disukai, sulit untuk membedakan antara makna nasionalisme dengan patriotisme yang lebih lazim digunakan, karena dalam manifestasi psikologis dan dampak terhadap perilakunya hampir serupa.²² Menurut *The Pew Global Attitudes Project* tahun 2004 dukungan terhadap kebijakan anti terorisme erat berkaitan dengan evaluasi tentang ancaman terorisme. Di Amerika Serikat kebanyakan kalangan percaya bahwa Amerika Serikat harus secara sungguh-sungguh menanggulangi bahaya terorisme internasional.²³

<i>Are US Terrorism Concerns Overblown?</i>			
	<i>America is overreacting to threat</i>	<i>U.S. is right to be so concerned</i>	<i>DK/Ref</i>
	%	%	%
U.S.	13	84	3
Britain	33	64	3
France	57	42	2
Germany	49	49	2
Russia	34	58	8
Turkey	55	33	13
Pakistan	66	8	26
Jordan	76	15	9
Morocco	72	20	8

Amerika Serikat di dalam dunia yang telah berubah

Zbigniew Brzezinski berpandangan bahwa kekuatan Amerika Serikat adalah penjamin stabilitas global, namun masyarakatnya mendorong gelagat sosial dunia yang memporakporandakan kedaulatan nasional.²⁴ Pandangan yang lain menunjukkan pula bahwa Amerika Serikat mempengaruhi militerisasi politik internasional sebagai agen pengeksport senjata terbesar di dunia. Namun hal ini sekaligus juga menciptakan ruang gerak bagi kalangan yang menginginkan kebijakan reformasi yang radikal di negerinya.²⁵

²⁰ Bruce Cumings, "Still the American Century," dalam *Review of International Studies* 25, f.5 (December 1999): 271-299.

²¹ Minxin Pei, "The Paradoxes of American Nationalism," 31-37.

²² *Ibid.*

²³ The Pew Global Attitudes Project, *A Year After Iraq War: Mistrust of America in Europe Ever Higher, Muslim Anxiety Persists. A Nine-Country Survey*, March 16, 2004: 17.

²⁴ Zbigniew Brzezinski, *The Choice: Global Domination or Global Leadership*, New York: Basic Books, 2004: vii.

²⁵ Peter J. Katzenstein, "Conclusion: National Security in a Changing World," dalam Peter J. Katzenstein (ed.), *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*.

Pendekatan bangsa Amerika terhadap urusan-urusan dunia juga acap kali berubah-ubah. Apakah itu menyangkut pandangan yang lahir di masa seusainya Perang Dunia I maupun II. Persamaannya hanya terletak pada kenyataan bahwa kedua perang dunia tersebut telah diselenggarakan atas nama nilai-nilai liberal. Konstruksi tatanan internasional yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut memang membutuhkan partisipasi aktif Amerika Serikat. Seusai Perang Dunia I Amerika Serikat secara tegas menolak memberikan kepemimpinan tersebut, sedangkan setelah Perang Dunia II Amerika Serikat menerimanya. Sebelum masa Perang Dingin bangsa Amerika lebih menyukai melangsungkan pengaruh politiknya daripada melakukan pengendalian politik secara langsung. Namun berbeda dengan bangsa lainnya, ekspansi Amerika Serikat cenderung di atasnamakan sejumlah prinsip-prinsip khas Amerika yakni demokrasi dan eksepsionalisme. Berbeda dengan keadaan masa kini, setelah Perang Dunia I keharmonisan internasional dianggap bisa wujud melalui proses demokrasi, pemberlakuan perdagangan bebas dan beroperasinya organisasi internasional. Setelah Perang Dunia II, di masa Perang Dingin dibutuhkan intervensi yang bersifat *preemptive* (mendahului), dan semakin ditonjolkannya orde ekonomi internasional serta bipolaritas.

Di masa pasca Perang Dingin tampaknya hubungan luar negeri Amerika Serikat semakin sarat dipengaruhi oleh nilai-nilai liberal. Namun masih saja tampak hal-hal lain yang bersifat tidak pasti. Keterlibatan Amerika Serikat sangat di dukung bangsanya terutama oleh kalangan yang berpengalaman dan faham soal politik luar negeri—biasanya mereka berpendidikan tinggi dan memang peduli tentang politik luar negeri. Merekalah yang menyusun agenda pasca Perang Dingin. Namun publik Amerika Serikat yang umumnya kurang mengamati hal-hal yang terjadi di luar negaranya, menunjukkan bahwa sekalipun bukan termasuk kalangan isolasionis, mereka tetap menginginkan “normalcy.” Keadaan yang normal kembali ini berarti sejauh mungkin menghindari beban keterlibatan internasional.²⁶ Mengenai hal ini tampaknya Katzenstein cenderung berbeda pendapat, menurutnya di masa pasca Perang Dingin politik luar negeri Amerika Serikat menjadi kurang stabil karena norma-norma dan doktrinnya tidak didefinisikan secara tegas.²⁷

Sebelum terjadinya tragedi 11 September 2001 memang telah ada indikasi bahwa politik Amerika mengarah kepada perbedaan yang tajam. Dewan Perwakilan Rakyatnya tampak menunjukkan komitmen ke arah unilateralisme sedangkan pihak eksekutif lebih mengutamakan multilateralisme.²⁸ Sementara itu pula perpaduan antara kekuatan Amerika Serikat dan globalisasi merubah secara tegas sifat dan pemikiran tentang keamanan nasional Amerika Serikat. Tehnologi telah meningkatkan kadar kerawanan masyarakat karena mobilisasi kalangan yang lemah dan miskin menjadi semakin dipermudah. Tentang hal ini Zbigniew Brzezinski beranggapan bahwa memang ada instabilitas politik di wilayah Eurasia antara Eropa dan Timur Jauh, atau sub wilayah Eurasia yang diistilahkan dengan “the Global Balkans.”²⁹ Baik presiden Bush Sr maupun Clinton kelihatannya tidak terlampau mendeteksi bahwa intensitas gejala global yang bersumber pada konflik nasional dan keagamaan ini akan mengakhiri visi tatanan dunia baru atau kerja sama global.³⁰

²⁶ Michael Mandelbaum, “A Struggle Between Two Paths,” dalam *World Policy Journal* 3 (Fall 1994): 95-101.

²⁷ Peter J. Katzenstein, “Conclusion: National Security in a Changing World,” dalam Peter J. Katzenstein (ed.), *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*: 529.

²⁸ *Ibid.*: 530

²⁹ Zbigniew Brzezinski, *The Choice: Global Domination or Global Leadership*: 42.

³⁰ *Ibid.*: 137.

Sebagaimana kita ketahui di tahun 1990an presiden Bush Sr pernah memproklamasikan Tata Dunia Baru (*The New World Order*) yang mengandung pengertian bahwa akan terbangun sebuah sistem global yang absah dan berlandaskan demokrasi. Namun di tahun 1999 politik luar negeri presiden Clinton justru menjungkir balikkan dua paradigma kebijakan Amerika Serikat di abad ke 20 yakni Doktrin Woodrow Wilson dan George Kennan. Doktrin Wilson bersifat defensif dan khusus karena mendukung hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dan kedaulatan nasional (*national sovereignty*). Doktrin Kennan bertujuan membendung Uni Soviet, menghalangi penyebaran komunisme dan memberi perlindungan terhadap negara bangsa. Doktrin Clinton tidak lagi bersifat defensif, anti-ekspansionis atau ditujukan untuk sekedar menjaga negara bangsa. Doktrin ini secara nyata menunjukkan sikap asertif, cenderung bersifat kolonialis dan bertujuan untuk mempertegas bahwa sistem pemerintahan demokratis serta perlindungan akan hak-hak asasi itu akan diperjuangkan secara universal. Presiden Clinton menjanjikan akan melakukan intervensi militer untuk menghentikan upaya pembunuhan berdasarkan ras maupun etnis tertentu "di dalam maupun di luar" perbatasan sebuah negara.

Baru setelah tragedi 9/11 pemerintahan Amerika Serikat secara tegas menyatakan bahwa segala sesuatunya di dunia ini telah berubah. Fokus diarahkan kepada perang melawan terorisme, pelaksanaan kebijakan unilateralis dan pengejaran agenda utopis. Padahal sebelumnya pemerintahan Bush diasosiasikan sebagai kekuatan yang bersifat rendah hati (*a humble power*) sekalipun tetap memperjuangkan kebebasan. Menurut Neta C. Crawford kebijakan baru Amerika Serikat ini bukannya sekedar sebuah utopi yang sederhana. Ia lebih merupakan manifestasi dari sebuah keinginan agar misi moral untuk merubah dunia ini difahami sebagai bagian dari strategi melawan terorisme.³¹ Tampaknya ada semacam kesepakatan di dalam pemerintahan Bush bahwa globalisasi telah semakin mendorong Amerika Serikat untuk menonjolkan nilai-nilainya guna mewujudkan keamanan nasionalnya.³² Sebagaimana yang telah kita saksikan sendiri, peristiwa 11 September 2001 telah melahirkan visi masa depan yang lebih mengandung ancaman karena kini secara tegas sebuah hegemoni global berperan langsung melawan terorisme.

Pemerintah Amerika Serikat menganggap bahwa kini ia tengah mewarisi dunia yang bukan saja cedera oleh kegagalan kekaisaran di masa yang lalu tetapi juga oleh kegagalan gerakan kebangsaan untuk menciptakan dan mengamankan negara-negara yang merdeka—dan ancaman yang terkini lebih berkenaan dengan keinginan kelompok ekstrim Islam untuk membangun sebuah tirani teokrasi di atas gagalnya mimpi kelompok nasionalis tersebut di atas.³³ Naik turunnya negara bangsa bukanlah hal yang baru, namun di dalam era modern ketika negara bangsa menjadi landasan untuk membangun tatanan dunia yang absah, disintegrasi melalui cara-cara kekerasan dan kelemahan yang lampak menonjol dari negara-negara di

³¹ Neta C. Crawford, "The Road to Global Empire: The Logic of U.S. Foreign Policy After 9/11," dalam *Orbis* 48 no. 4 (Fall 2004): 691-7.

³² *Ibid.*: 693.

³³ Michael Ignatieff, "The Burden. With a military of unrivaled might, the United States rules a new kind of empire. Will this cost America its soul or save it?" dalam *The New York Times Magazine*, 3 January 2003: 22-54.

benua Afrika, Asia, Pasifik, dan Amerika Latin cenderung mengancam eksistensi sistem internasional yang ada.³⁴

Dengan terjadinya peristiwa September 11 hal ini sekaligus juga mengaktualisasikan sebuah perjuangan jangka panjang di kalangan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam menentukan apakah akhirnya akan diperintah oleh kekuasaan yang bersifat otoriter, kelompok Islam sayap kanan, atau oleh kalangan yang bersikap demokratis. Amerika Serikat memandang dirinya berkewajiban membendung kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi karena keamanannya akan sangat bergantung kepada efektifitas kebijakannya di dunia.³⁵

Di tahun 2002 kebijakan Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat menyatakan dengan tegas akan dipertahankannya keunggulan militer Amerika Serikat. Amerika Serikat juga akan memberlakukan hak strategis khusus untuk mendahului dengan melawan ancaman melalui tindakan militer. Dapatlah difahami bilamana kemudian kebijakan luar negeri pemerintahan Amerika Serikat lebih berkenaan dengan hal-hal berikut ini:

1. Agenda perekonomian (pasar bebas dan demokrasi liberal)
2. Keseimbangan Kekuasaan (*balance of power*)
3. Aksi polisional (*imperial policing*) di luar negeri:
 - Mengupayakan delegitimasi terorisme.
 - Politik koalisi.
 - Upaya mencegah pembiayaan terorisme melalui resolusi PBB, Uni Eropa, G7/G8 FATF, secara bilateral.
 - Upaya mengatasi secara global penyebaran Senjata Pemusnah Masal (*WMD*)
4. Perubahan rezim (*preemption*).

Kampanye untuk mengekspor nilai-nilai Amerika

Masalah yang kini dihadapi presiden Bush cukup pelik karena masalah dunia cenderung menjadi kian kompleks. Ada 140,000 orang tentara Amerika Serikat yang terlibat di Irak sementara perang melawan terorisme pun masih terus berlanjut, di samping itu Iran pun akan memperoleh senjata nuklir, sedangkan Korea Utara telah mendeklarasikan kepemilikan persenjataan nuklirnya. Bush tampaknya tidak akan mengubah diplomasinya yang bersifat asertif yang telah meningkatkan sikap anti Amerika di dunia. Yang akan terjadi di masa periode ke dua Bush hanyalah pergeseran langgam dan proses pengupayaan perbaikan hubungan yang sempat tegang dengan negara-negara Eropa di masa sebelum berlangsungnya perang di Irak.

³⁴ Robert L. Rothberg, "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators," dalam Robert L. Rothberg (ed.), *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, Washington DC: Brookings Institution Press, 2003.
³⁵ Michael Ignatieff, "The Burden. With a military of unrivaled might, the United States rules a new kind of empire. Will this cost America its soul or save it?" David Greenberg, "Fathers and Sons," dalam *The New Yorker Magazine*, 12-19 July 2004.

Menonjolnya semangat keagamaan George W. Bush bukanlah hal yang baru di Amerika Serikat karena hal ini ada kemiripannya dengan seorang pendahulunya yakni presiden Jimmy Carter. George W. Bush adalah seorang aktivis politik penginjil semenjak kampanye George Bush Sr di tahun 1988. Ia melihat perang melawan terorisme sebagai sebuah perang dengan dimensi keagamaan dan melihat dirinya sebagai bagian dari rencana Tuhan.³⁶ Tampaknya pendekatan teologis presiden Bush membuat ancaman yang menghadang dianggap sebagai sesuatu yang identik dengan sebuah pertarungan antara hal yang baik dengan hal yang jahat, yang selanjutnya pun akan mempermudah berlangsungnya mobilisasi sosial.

Mudah dimengerti apabila kalangan Protestan fundamentalis yang mendukung partai Republik mempunyai preferensi bahwa politik luar negeri Amerika Serikat itu memiliki tujuan-tujuan moral. Adanya dukungan akar rumput semacam ini telah membuat sifat dukungan mereka menjadi amat berbeda dengan apa yang telah terjadi di masa sebelumnya ketika gereja mendukung idealisme Wilson dan Roosevelt yang lebih bersifat elitis. Namun, menurut Andrew J. Bacevich ancaman terbesar terhadap Amerika Serikat sesungguhnya lebih bersumber pada keyakinan kelompok neokonservatif yang kini sangat berpengaruh yakni bahwa keamanan Amerika Serikat itu sangat bergantung kepada hegemoni global Amerika dan keharusan pemberlakuan nilai-nilai Amerika di seluruh dunia.³⁷

Memang mudah timbul salah pengertian ketika partai Republik berhasil menghimpun dukungan umat Protestan fundamentalis bahwa mereka tentunya secara serta merta akan aktif berperanan dalam menentukan politik luar negeri Amerika Serikat. Padahal dalam kenyataannya kalangan yang memilih berdasarkan isu moral sebenarnya bersifat konstan di Amerika Serikat. Yang lebih menentukan lahirnya gelagat baru dalam praktek internasional Amerika Serikat adalah suasana politik pasca peristiwa 11 September 2001 dan sangat kuatnya dukungan kelompok

SUPPORT FOR MILITARY OPERATIONS IN THE WAR ON TERRORISM		
<i>Percentage who...</i>	2002	1998
<i>Approve of the use of U.S. troops to destroy a terrorist camp</i>	92	NA
<i>Favor U.S. air strikes against terrorist training camps and other facilities to combat terrorism</i>	87	74
<i>Favor attacks by ground troops against terrorist camps and other facilities to combat terrorism</i>	84	57
<i>Favor the use of U.S. troops to assist the Philippine government to fight terrorism</i>	78	NA
<i>Favor toppling unfriendly regimes that support terrorist groups threatening the United States</i>	73	NA
<i>Favor assassination of individual terrorist leaders</i>	66	54
<i>Favor the use of U.S. troops if the government of Pakistan requested our help against a radical Islamic revolution</i>	61	NA
<i>Favor the use of U.S. troops if the government of Saudi Arabia requested our help against an attempt to overthrow it</i>	54	NA

³⁶ Paul Craig Roberts, "Empire and Militant Christianity: How Americans Were Seduced by War," dalam *Counterpunch*, 18 January 2005.

neokonservatif ini terhadap prinsip-prinsip politik luar negeri George W. Bush yang menghendaki hilangnya pembatasan-pembatasan yang dipaksakan oleh kawan-kawan, sekutu maupun institusi internasional. Amerika Serikat diharapkan akan memanfaatkan kekuatannya untuk merubah *status quo* di dunia.

Presiden Bush juga memperoleh kemenangan dalam pemilu 2004 karena terorisme yang begitu mengerikan kembali berada di dalam benak para pemilih di Amerika Serikat. Di tahun 2002 saja menurut survey *The Chicago Council on Foreign Relations* tampak secara jelas dukungan publik Amerika terhadap operasi militer dalam Perang melawan Terorisme (*the war on terrorism*) masalah yang dianggap terpenting oleh masyarakat di Amerika Serikat.³⁸ Neta Crawford menegaskan kembali kenyataan ini sebagai cerminan dari rasa ketakutan dan kerisauan yang berdampak kepada kemampuan seorang warga dalam memproses informasi, mengambil keputusan, dan menilai bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap perilakunya.³⁹

Dengan demikian bisa pula disimpulkan bahwa di zaman terorisme ini rasa ketakutan dan ketidakamanan telah mendorong rakyat Amerika untuk memilih pemimpin yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kepentingan ekonominya. Kenyataan ini tampaknya sangat bertentangan dengan soal *the American creed* sebagai mana yang pernah dijelaskan oleh Samuel P. Huntington dalam tulisannya, yang terdahulu.⁴⁰ Ketika itu Huntington menggambarkan bahwa gerakan reformasi di Amerika Serikat senantiasa ditujukan untuk memodifikasi institusi-institusi politik dan ekonominya. Gerakan-gerakan pembaharuan itu terjadi dan seringkali cenderung mengatas namakan gagasan-gagasan liberal demokratis.⁴¹ Jika kemudian terjadi pula semacam kebingungan tentang tujuan (*purposes*) politik luar negeri Amerika Serikat masalahnya lebih berakar pada soal identitas bangsanya. Yang lazim berlaku di saat itu adalah kenyataan yang bersifat paradox bahwa untuk mendorong lahirnya kebebasan di dalam negeri kekuasaan pemerintah Amerika Serikat perlu dibatasi namun untuk mewujudkan perluasan kebebasan di luar negeri dirasa perlu untuk memperkokoh kekuasaan pemerintahan Amerika Serikat.⁴²

Paradox tersebut di atas terwujud secara nyata semenjak terjadinya peristiwa September 11, 2001. Kita saksikan kini adanya bentuk pemerintahan di Amerika Serikat yang berdasarkan inisiatif masyarakat yang bersifat keagamaan (*faith-based presidency*). Ia sekaligus juga menjadi jawaban yang dibutuhkan untuk melawan terorisme. Di samping itu pula dibentuk *Department of Homeland Security* (DHS); diberlakukan *USA-PATRIOT ACT* yang merupakan payung mekanisme DHS untuk menjaring informasi dari masyarakat; dan diterapkannya pula *Military Tribunal* (Penerapan Pengadilan Militer) bagi kalangan yang dicurigai mendukung aksi-aksi terorisme. Sedangkan untuk menyebarkan nilai-nilai Amerika di dunia tampaknya keberhasilan mewujudkan kebebasan sekaligus juga menjadi alat dan tujuan politik luar negeri Amerika Serikat. Kini demokrasi dianggap bermanfaat untuk mencapai keselamatan dan keamanan global.⁴³ Hal ini dianggap sesuai dengan

³⁸ The Chicago Council on Foreign Relations, *Worldview 2002. American Public Opinion and Foreign Policy*, 2002: 23.

³⁹ Neta C. Crawford, "The Road to Global Empire: The Logic of U.S. Foreign Policy After 9/11," 700. Samuel P. Huntington, "American Ideals versus American Institutions," dalam G. John Ikenberry, *American Foreign Policy: Theoretical Essays*.

⁴⁰ *Ibid.*: 232.

⁴¹ *Ibid.*: 250.

⁴² Charles Krauthammer, "In Defense of Democratic Realism," dalam *The National Interest* no. 77 (September 2004): 15-25.

identitas bangsanya karena pada dasarnya bangsa Amerika bukan saja bangga akan nilai-nilainya itu namun juga menganggapnya sebagai hal yang pantas diterapkan secara universal.⁴⁴ Yang didengung-dengungkan adalah gagasan-gagasan politiknya seperti kebebasan, demokrasi dan pengoperasian lembaga-lembaganya.

Kesimpulan

Bilamana Perang Dingin merupakan masa yang cukup jelas konturnya karena komunisme Uni Soviet merupakan bahaya yang begitu tegas mengancam, sebagai perbandingan dengan keadaan tersebut masa pasca Perang Dingin tampak membingungkan. Peristiwa 11 September telah merubah segalanya sekalipun dalam konteks sejarahnya politik luar negeri Amerika Serikat erat kaitannya dengan tiga buah kecenderungan utama yakni minimalisme unilateralis (*unilateral minimalism*), imperial unilateralis (*unilateral imperialism*) dan multilateralis yang bertanggung jawab (*responsible multilateralism*).⁴⁵ Di masa pasca Perang Dingin dari tahun 1990 hingga 2001 Amerika Serikat telah mulai menerapkan sebuah strategi global dan imperial. Jadi menurut pandangan Neta Crawford dalam kenyataannya setelah September 11 yang terjadi adalah sebuah kontinuitas dalam politik luar negeri Amerika Serikat.⁴⁶ Kini hanya empat hal berikut inilah yang benar-benar telah berubah: menonjolnya keunggulan (*preeminence*), perencanaan berdasarkan kapabilitas (*capabilities-based planning*), perang untuk mendahului (*preemption*), dan kontra proliferasi (*counter proliferation*).⁴⁷ Kebijakan-kebijakan ini bersumber pada pandangan pemerintahan Bush tentang kesempatan dan tantangan globalisasi, bukan hanya untuk seluruh dunia namun juga untuk Amerika Serikat sendiri.⁴⁸

Karena persepsi kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat menjadi besar dan semakin bersifat global—demikian pula kerentanan Amerika Serikat. Kerisauan terhadap hal ini dan semakin tidak adanya prediktibilitas telah mendorong Amerika Serikat untuk mengupayakan terwujudnya sebuah lingkungan strategis (*it seeks to shape the strategic landscape*) demi terciptanya stabilitas. Tampaknya strategi keamanan nasional Amerika Serikat kini telah kian menjadi global baik secara aspiratif maupun dalam realitas implementasinya.⁴⁹ Politik luar negeri Amerika Serikat setelah September 11 mengkombinasikan rasa kepastian moral maupun misi global di masa Perang Dingin dengan sebuah rasa ketakutan serta hal-hal lainnya yang bersifat mendesak.⁵⁰ Namun tujuan dan kebijakan pemerintahan George Bush periode kedua tampaknya juga akan ditentukan oleh realitas bahwa Amerika Serikat adalah sebuah demokrasi liberal. Hal ini terdorong oleh identitas bangsanya yang dipengaruhi oleh konsekuensi tindakan di masa sebelumnya yang menyebabkan Amerika Serikat cukup terisolasi karena tindakannya dianggap melanggar hukum internasional. Namun demikian kelompok neokonservatif yang semakin berperan akan terus mengupayakan transformasi radikal peran global

⁴⁴ Minxin Pei, "The Paradoxes of American Nationalism," 32.

⁴⁵ Neta C. Crawford, "The Road to Global Empire: The Logic of U.S. Foreign Policy After 9/11," 685-7.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., 698-699.

tradisional Amerika Serikat. Sehingga tidak mengherankan atau dapatlah difahami apabila dalam periode kedua ini doktrin Bush akan terus mengupayakan pertahanan perdamaian, memperluas perdamaian dan meluaskan perdamaian dengan memperluas demokrasi. Di samping kenyataan bahwa Bush memang yakin akan kekuatan kebebasan, keleluasaan bertindak dan jahatnya radikalisme Islam.⁵¹

Kalangan yang tidak sepekat seperti Zbigniew Brzezinski mengkhawatirkan bahwa perpaduan antara kekuasaan hegemoni dengan sebuah demokrasi yang berhasil di wujudkan di Amerika Serikat secara otomatis akan memberi justifikasi untuk berlangsungnya upaya penyebarluasan demokrasi massa ke seluruh dunia. Dalam kenyataannya dampak sosial kebijakan Amerika Serikat ini seringkali lebih mirip dengan sebuah revolusi kultural dan justru dapat mendorong terwujudnya instabilitas. Kekuasaan hegemoni akan mampu mempromosikan demokrasi di luar negeri apabila dalam penerapannya cukup peka terhadap hak-hak orang lain.⁵²

Terpilihnya Condoleezza Rice sebagai menteri luar negeri menyiratkan bahwa pemerintahan Bush akan terus menjalankan politik luar negeri yang mempromosikan kebebasan, pasar bebas serta perdamaian. Perdamaian adalah kunci terciptanya kemakmuran dan kebebasan. Kebijakannya pun akan mencerminkan kehendak presiden Bush untuk melanjutkan upaya pencapaian perdamaian melalui penghapusan kondisi yang mendorong lahirnya radikalisme. Kekuatan kebebasan manusia adalah satu-satunya yang dianggap dapat menghentikan kekuasaan sebuah tirani serta ancaman terorisme dan menggantikan rasa kebencian dengan cara mewujudkan harapan.⁵³

Dengan menggunakan lensa konseptual konteks institusional kultural dan identitas memang tampaknya Amerika Serikat telah terbenam dalam konteks global yang tidak semuanya dapat ditelusuri sebagai hal yang bersumber pada dirinya sendiri. Rasa kekhawatiran ini tampak ketika Samuel P. Huntington secara tegas menganjurkan dalam bukunya "Who Are We," agar kebudayaan Anglo-Protestan dan nilai-nilai politiknya terus dilestarikan, namun ketidakjelasan (*incoherence*) kebijakan luar negerinya seringkali juga mencerminkan maraknya diversitas dan lemahnya identitas kolektif Amerika Serikat sekalipun September 11, 2001 telah membangun kembali sebuah identitas yang fungsional. Keadaan ini cenderung mengesankan bahwa akan tetap sulit untuk mencapai tujuan menumpas kalangan Islam radikal di dunia karena tantangan semacam ini membutuhkan studi yang mendalam sebagaimana yang pernah dilakukan ketika Amerika Serikat tengah membendung kekuatan Uni Soviet, namun demikian, John Ikenberry tetap merasa optimistik. Ia menyimpulkan bahwa fungsionalitas sistem atau tatanan dunia yang dibangun sesungguhnya bersumber pada identitas politik Amerika Serikat yang bercirikan nasionalisme kewarganegaraan (*Civic Nationalism*) dan multikulturalisme. Tatanan yang dibangun Amerika Serikat ini unggul karena identitas kewarganegaraan nasionalnya membawa implikasi sebagai berikut.⁵⁴ Pertama, identitas kewarganegaraan Amerika terus mendorong prinsip-prinsip domestik yang

⁵¹ Nancy Gibbs dan John F. Dickerson, "Inside the Mind of George W. Bush. For this President, the Essence of Wisdom Lies in Knowing When Not to Change," in *Time*, 6 September 2004: 20.

⁵² Zbigniew Brzezinski, *The Choice: Global Domination or Global Leadership*: 179.

⁵³ Transcript: 2005 State of the Union Address, dalam *The Washington Post*, 2 February 2005.

⁵⁴ G. John Ikenberry, "American Unipolarity: The Sources of Persistence and Decline," dalam G. John Ikenberry (ed.), *America Unrivaled, The Future of the Balance of Power*, Ithaca: Cornell University Press, 2002: 287-9.

bersifat inklusif dan mengacu pada peraturan (*rule based*). Kedua, nasionalisme kewarganegaraan ini juga didukung negara-negara lain sebagai sumber persatuan dan kerjasama. Ketiga, sifat multikultural identitas politik Amerika Serikat cenderung membuka kesempatan untuk menyerap dan mengintegrasikan kaum imigran di dalam sebuah sistem politik yang stabil dan bercirikan diversitas. Kapasitas integratif ini akan menjadi semakin penting karena hal ini akan semakin membuat Amerika Serikat menjadi pusat perekonomian dunia yang dinamis.

Bibliography

Brzezinski, Zbigniew, The Choice: Global Domination or Global Leadership, New York: Basic Book, 2004

Crawford, Neta C., "The Road to Global Empire: The Logic of U.S. Foreign Policy After 9/11," dalam Orbis 48, no. 4 (Fall 2004): 685-696.

Cummings, Bruce, "Still the American Century," dalam Review of International Studies 25 i 5 (December 1999): 271-299.

Gibbs, Nancy dan John F. Dickerson, "Inside the Mind of George W. Bush. For this President, the Essence of Wisdom Lies in Knowing When Not to Change," dalam Time, 6 September 2004: 18-37.

Greenberg, David "Fathers and Sons," dalam The New Yorker Magazine, 12-19 July 2004.

Hoffman, Stanley, Gulliver's Troubles, or the Setting of American Foreign Policy, New York: McGraw-Hill Book Company, 1968.

Huntington, Samuel P., "American Ideals versus American Institutions," dalam G. John Ikenberry, American Foreign Policy. Theoretical Essays, third edition, New York: Longman, 1999.

Huntington, Samuel P., Who Are We? The Challenges to America's National Identity, New York: Simon Schuster 2004; Alan Wolfe, "Review Essay: Native Son. Samuel P. Huntington Defends the Homeland," dalam Foreign Affairs 83, no. 3 (May/June 2004): 120-125; Response: "Creedal Passions. Immigration and American Identity. "Samuel P. Huntington, "Getting Me Wrong," dan Alan Wolfe, "Wolfe Replies," dan Samuel P. Huntington, "Replies," dalam Foreign Affairs 83, no. 5 (September/October 2004): 155-158; 158-159; 159.

Ignatieff, Michael, "The Burden. With a military of unrivaled might, the United States rules a new kind of empire. Will this cost America its soul or save it?" dalam The New York Times Magazine, 5 January 2003: 22-54.

Ikenberry, G. John, "American Grand Strategy in the Age of Terror," dalam Survival 43, no. 4 (Winter 2001-02): 19-34.

Ikenberry, G. John (ed.), America Unrivaled. The Future of the Balance of Power, Ithaca: Cornell University Press, 2002.

Ikenberry, G. John, "Conclusion. American Unipolarity: The Sources of Persistence and Decline," dalam G. John Ikenberry (ed.), America Unrivaled. The Future of the Balance of Power, Ithaca: Cornell University Press, 2002: 284-310.

Katzenstein, Peter J., "Conclusion: National Security in a Changing World," dalam Peter J. Katzenstein (ed.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York: Columbia University Press, 1996.

Krauthammer, Charles, "In Defense of Democratic Realism," dalam The National Interest no. 77 (September 2004): 15-25.

Lapid, Yosef and Friedrich Kratochwil (eds.), The Return of Culture and Identity in International Relations Theory, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1996.

Mandelbaum, Michael, The Fate of Nations. The Search for National Security in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Mandelbaum, Michael, "A Struggle Between Two Pasts," dalam World Policy Journal, 3 (Fall 1994): 95-103.

Matarese, Susan M., American Foreign Policy and the Utopian Imagination, Amherst: University of Massachusetts Press, 2001.

Nau, Henry R., At Home Abroad. Identity and Power in American Foreign Policy, Ithaca: Cornell University Press, 2002.

Osgood, Robert E. Ideals and Self Interest in America's Foreign Relations. The Great Transformation of the Twentieth Century, third impression, Chicago: The University of Chicago Press, 1961.

Owen IV, John M., "Transnational Liberalism and American Primacy; or Benignity is in the Eye of the Beholder," dalam G. John Ikenberry (ed.), America Unrivaled. The Future of the Balance of Power, Ithaca: Cornell University Press, 2002: 239-259.

Pei, Minxin, "The Paradoxes of American Nationalism," dalam Foreign Policy 136 (May-June 2003): 31-37.

Risse, Thomas, "U.S. Power in a Liberal Security Community," dalam G. John Ikenberry (ed.), America Unrivaled. The Future of the Balance of Power, Ithaca: Cornell University Press, 2002: 260-283.

Roberts, Paul Craig, "Empire and Militant Christianity. How Americans Were Seduced by War," dalam Counterpunch, 18 Januari 2005.

Rotberg, Robert I., "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators," dalam Robert I. Rotberg (ed.), State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Washington DC: Brookings Institution Press, 2003.

Smith, Rogers M., "The Politics of Identities and the Tasks of Political Science," dalam Ian Shapiro et al. (eds.), Problems and Methods in the Study of Politics, Cambridge University Press, 2004.

Shapiro, Ian, Rogers M. Smith and Tarek E. Masoud (eds.), Problems and Methods in the Study of Politics, Cambridge University Press, 2004

Telhami, Shibley dan Michael Barnett, "Introduction: Identity and Foreign Policy in the Middle East," dalam Shibley Telhami dan Michael Barnett (eds.), Identity and Foreign Policy in the Middle East, Ithaca: Cornell University Press, 2002.

The Chicago Council on Foreign Relations, Worldviews 2002. American Public Opinion and Foreign Policy, 2002.

The Pew Global Attitudes Project, A Year After Iraq War. Mistrust of America in Europe Ever Higher, Muslim Anger Persists. A Nine-Country Survey, March 16, 2004.

Transcript: 2005 State of the Union Address, dalam The Washington Post, 2 February 2005.

Wedeen, Lisa, "Conceptualizing Culture: Possibilities for Political Science," dalam APSR 96, no. 4 (December 2002): 713-728.